



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LIS DWI RAHMAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 425520

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.012.792.000

1. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , Rp. 265.248.000
2. Tanah Seluas 923 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 75.440.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/224 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , Rp. 422.104.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 418.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV 1,5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOTOR, HONDA N1N02Q54L2 A/T, SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.755.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.835.244

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.804.382.244

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.804.382.244

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.